

**TESIS**

**IMPLIKASI HUKUM KEPADA TERDAKWA  
YANG DIPUTUS BEBAS**



Diajukan Oleh :

**HERMAWAN BUDI SANTOSO**  
NIM : 2320215310119

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FALKUTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2025**

# **IMPLIKASI HUKUM KEPADA TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS**

Tesis S-2

Program Magister Hukum

Diajukan Oleh

**HERMAWAN BUDI SANTOSO  
NIM. 2320215310119**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

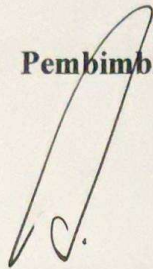
**Judul Tesis : IMPLIKASI HUKUM KEPADA TERDAKWA YANG  
DIPUTUS BEBAS**

**Nama : Hermawan Budi Santoso**

**Nim : 2320215310119**

**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing**

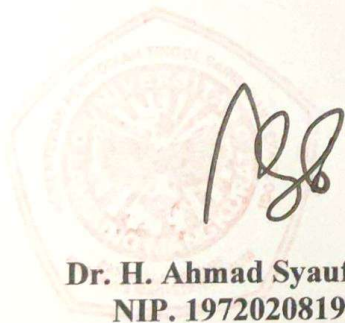

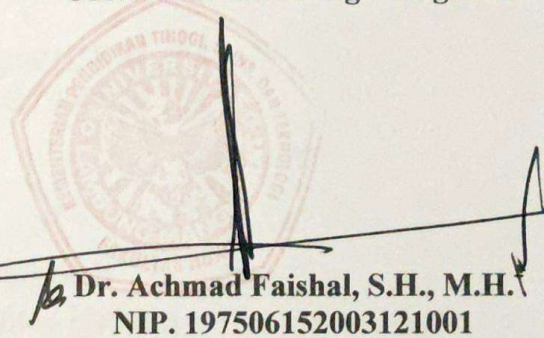
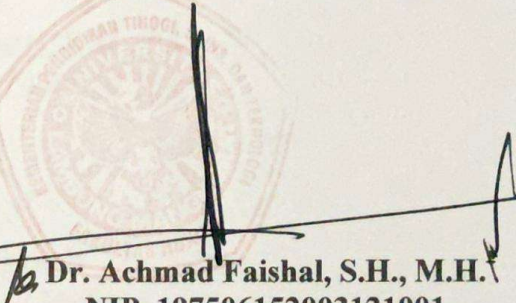


**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
NIP. 197610172001121002**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

  
  
**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004**  
  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

**Tanggal Lulus : 21 Juli 2025**

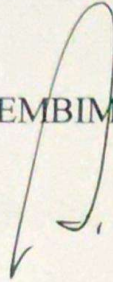
**Tanggal Wisuda :**

Tesis Ini

Telah Diperiksa dan Disetujui

Pada Tanggal .....

PEMBIMBING




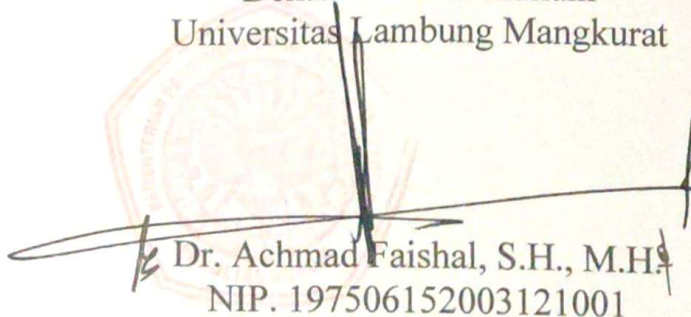
Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
NIP. 197610172001121002

Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 21 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H

Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Maka hukum harus lentur terhadap keadilan.”*

-Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.-

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Ayahanda Tersayang Suhirman, Sosok yang mengajarkanku arti tanggung jawab, keteguhan, dan kerja keras. Dari langkahmu, aku belajar untuk tidak mudah menyerah. Engkau mungkin jarang berbicara banyak, tetapi setiap tindakanmu adalah nasihat yang nyata tentang bagaimana menjadi pribadi yang tegar dan berprinsip. Terima kasih atas semangat dan doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah pendidikanku.
2. Ibuku Tercinta Wiwin Budi Rahayu, Sumber kasih sayang tak terbatas yang selalu menjadi tempat kembali di tengah lelah dan gundah. Dari hatimu, aku belajar arti ketulusan, keikhlasan, dan ketabahan. Doamu adalah pelindung dalam setiap perjalanan hidupku, dan cintamu adalah energi yang tak tergantikan dalam setiap perjuanganku. Terima kasih telah menjadi cahaya, pelindung, dan kekuatan dalam diam.

Saya persembahkan pula pemikiran sederhana ini kepada :

- \* Bangsa dan Negaraku Indonesia
- \* Almameter tercinta, Universitas Lambung Mangkurat
- \* Trusted and Reassure Law Office
- \* LBH Peduli Hukum dan Keadilan

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hermawan Budi Santoso

NIM : 2320215310119

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Implikasi Hukum Kepada Terdakwa Yang Diputus  
Bebas

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 15 Juli 2025

Yang membuat Pernyataan



Hermawan Budi Santoso

**BUDI SANTOSO, HERMAWAN. 2025 IMPLIKASI HUKUM KEPADA TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 113 halaman.**

### **RINGKASAN**

Tesis ini membahas implikasi hukum terhadap terdakwa yang diputus bebas, khususnya terkait hak untuk memperoleh ganti kerugian dari negara. Meskipun Pasal 95 KUHAP menjamin hak terdakwa untuk menuntut ganti rugi atas penangkapan, penahanan, atau penuntutan yang tidak sah, dalam praktiknya banyak terdakwa yang tidak menggunakan hak tersebut. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, kurangnya informasi dari aparat penegak hukum, serta lemahnya implementasi peraturan yang mengatur tentang ganti kerugian. Banyak kasus salah tangkap atau kekeliruan penegakan hukum tidak disertai dengan pemulihan hak terdakwa secara adil. Putusan bebas sering kali tidak diikuti dengan rehabilitasi maupun kompensasi yang layak, baik secara moral maupun materiil, meskipun terdakwa telah mengalami kerugian besar secara sosial, ekonomi, dan psikologis. Dalam praktik pengadilan pun, pengajuan ganti rugi sering terkendala oleh tidak adanya standar penilaian, prosedur yang rumit, dan tidak tersedianya anggaran khusus. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi terhadap sistem pengaturan ganti rugi yang lebih responsif, adil, dan berpihak pada korban salah proses hukum. Reformulasi ini penting untuk menjamin bahwa negara tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga bertanggung jawab atas kekeliruan dalam proses peradilan. Dengan demikian, hak asasi manusia terdakwa dapat terlindungi secara nyata, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dapat ditingkatkan.

Tujuan penulisan tesis yang berjudul Implikasi Hukum Kepada Terdakwa Yang Diputus Bebas adalah Menganalisis pengaturan hukum terkait hak terdakwa yang diputus bebas untuk memperoleh ganti kerugian; Merumuskan bentuk ideal reformulasi aturan ganti kerugian yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.;

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat preskriptif, yang bertujuan untuk memberikan solusi atas kekaburan hukum terkait Pasal 95 KUHAP mengenai hak ganti kerugian bagi terdakwa yang diputus bebas. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menelaah regulasi yang relevan serta menganalisis putusan-putusan pengadilan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif dan induktif untuk merumuskan kesimpulan serta rekomendasi hukum yang relevan.

**BUDI SANTOSO, HERMAWAN. 2025 IMPLIKASI HUKUM KEPADA TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS.** Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 113 halaman.

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Terdakwa Diputus Bebas, Ganti Kerugian, Reformulasi Hukum

Tesis ini mengkaji implikasi hukum terhadap terdakwa yang diputus bebas, khususnya terkait hak untuk memperoleh ganti kerugian dari negara berdasarkan Pasal 95 KUHP. Secara normatif, terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang sah berhak mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Namun dalam praktik, pelaksanaan hak ini belum berjalan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada kurangnya pemahaman hukum dari terdakwa, lemahnya implementasi peraturan, tidak tersedianya standar nilai ganti rugi yang baku, serta terbatasnya anggaran negara untuk membayar kompensasi. Selain itu, prosedur yang kompleks dan minimnya peran aktif aparat penegak hukum dalam memberikan informasi turut menghambat pemulihan hak terdakwa. Meskipun ada beberapa putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan ganti kerugian, realisasinya di lapangan masih belum optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan aplikatif, termasuk penyederhanaan prosedur, penetapan standar kompensasi, penguatan lembaga pengawas, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Reformulasi ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, mewujudkan keadilan substantif, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia..

**BUDI SANTOSO, HERMAWAN. 2025 IMPLIKASI HUKUM KEPADA TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS.** Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. 113 halaman.

### **ABSTRACT**

*Keywords: Acquitted Defendant, Compensation, Legal Reform*

*This thesis examines the legal implications for defendants who are acquitted in Indonesia's criminal justice system, particularly regarding their right to claim compensation from the state under Article 95 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). Normatively, any individual who is arrested, detained, prosecuted, or tried without lawful grounds is entitled to seek compensation and rehabilitation. However, in practice, the enforcement of this right remains ineffective. The research findings reveal that the main obstacles include limited legal awareness among defendants, weak enforcement of existing regulations, the absence of clear standards for determining the amount of compensation, and insufficient state budget allocation for reparations. Additionally, complex procedures and the lack of proactive roles from law enforcement officers in informing defendants of their rights further hinder the realization of justice. Although there have been court rulings granting compensation, their implementation is often inadequate. Based on these findings, the study recommends a comprehensive reformulation of the legal framework, including simplifying procedures, setting clear compensation standards, strengthening judicial oversight, and conducting widespread legal education for the public. Such reform is essential to ensure human rights protection, realize substantive justice, and restore public trust in Indonesia's criminal justice system.*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Allhamdulillahirabbilalamiin, segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “Implikasi Hukum Kepada Terdakwa Yang Diputus Bebas” sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pascasarjana Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini.

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Periode 2022-2026;
2. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini;
3. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini;
4. Seluruh Dosen mata kuliah di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
5. Kedua Orang Tua, yang dengan segala doa, peluh, dan pengorbanan tak terucapkan, telah menjadi cahaya dalam setiap langkahku. Terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah surut, kesabaran yang tanpa batas, serta orongan yang tak henti-hentinya dalam setiap tahapan hidup dan pendidikan yang kujalani. Dari tangan kalian aku belajar arti ketulusan, dari nasihat kalian aku memahami arah, dan dari doa kalian aku mendapatkan kekuatan.
6. Bapak Dr. Sugeng Aribowo, SH.,MM.,MH selaku pimpinan *Trusted and Reassure Law Office* serta rekan-rekan akrab penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan Tesis ini;

7. Rekan-rekan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 baik dari yang sudah lama kenal maupun baru dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis;
8. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan tesis ini;

Pada penghujung penulisan ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan, kelemahan, maupun keterbatasan yang terdapat dalam penyusunan karya ini. Hal tersebut tak lepas dari keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis dalam menggali dan menguraikan berbagai aspek yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kendati demikian, penulis tetap menyimpan harapan bahwa tulisan sederhana ini dapat memberikan kontribusi, meskipun kecil, bagi siapa saja yang memerlukan, baik sebagai referensi akademik maupun sebagai bahan pertimbangan dalam memahami persoalan yang diangkat. Penulis juga berharap bahwa karya ini dapat menjadi pijakan awal untuk pengembangan kajian lebih lanjut oleh para pembaca yang memiliki minat dalam bidang yang sama. Semoga apa yang disampaikan dalam penulisan ini mampu memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bagian dari upaya memperkaya khazanah keilmuan yang relevan.

Banjarmasin, 16 Juli 2025



— Hermawan Budi Santoso —

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN_MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. KEASLIAN PENELITIAN .....	9
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	12
E. TINJAUAN PUSTAKA .....	14
F. METODE PENELITIAN .....	33
G. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN .....	39
BAB II PENGATURAN TERHADAP TERDAKWA YANG DI PUTUS BEBAS BERHAK MENDAPATKAN KOMPENSASI OLEH NEGARA .....	40
A. PERATURAN HUKUM TENTANG GANTI RUGI .....	40
B. KEWENANGAN LEMBAGA YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI DAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN .....	57
C. TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM.....	66
BAB III REFORMULASI PENGATURAN KOMPENSASI NEGARA KEPADA TERDAKWA YANG DI PUTUS BEBAS .....	77
A. URGENSI REFORMULASI PENGATURAN GANTI RUGI.....	77
B. MASALAH POKOK DALAM PERATURAN GANTI KERUGIAN DAN USULAN REFORMULI PENGATURAN GANTI KERUGIAN.	98
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	106
A. KESIMPULAN.....	106
B. SARAN.....	107
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	